

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Publik Lokal di Wilayah Perbatasan Merauke melalui Forum Konsultasi Publik dan Pelatihan Literasi Kebijakan

Martinus Wika¹; Ivone Agustina Nathan²; Rosina Jostina Marise Kebubun³; Josafat Fonataba⁴

^{1,2,3,4}STISIPOL Yaleka Maro Merauke



Email Korespodensi: martinuswika202@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 02-01-2026

Disetujui 15-01-2026

Diterbitkan 30-01-2026

Katakunci:

*Partisipasi Masyarakat;
Literasi Kebijakan; Forum
Konsultasi Publik;
Pemberdayaan
Masyarakat; Kampung
Yanggandur.*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat Kampung Yanggandur, Merauke, dalam perumusan kebijakan publik lokal melalui forum konsultasi publik dan pelatihan literasi kebijakan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi. Tahap awal meliputi pemetaan sosial dan wawancara dengan aparat kampung, tokoh adt, dan perwakilan warga untuk memahami kondisi eksisting partisipasi masyarakat serta kendala dalam menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan edukasi literasi kebijakan publik melalui penyuluhan interaktif yang membahas mekanisme perumusan kebijakan, hak partisipasi masyarakat, dan alur administrasi kampung. Tahap pelatihan dan simulasi forum konsultasi publik membekali warga dengan keterampilan komunikasi administratif, penyusunan aspirasi tertulis, dan praktik musyawarah partisipatif berbasis kasus lokal. Pendampingan forum dialog antara masyarakat dan aparat kampung memastikan keberlanjutan praktik partisipatif serta pembentukan forum yang sistematis dan terdokumentasi. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat, keterampilan literasi kebijakan, serta terbentuknya forum konsultasi publik yang inklusif dan akuntabel. Model partisipasi yang dihasilkan berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan kampung secara transparan, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi referensi replikasi bagi wilayah perbatasan lain.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wika, M., Nathan, I. A. ., Kebubun, R. J. M. ., & Fonataba, J. . (2026). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Publik Lokal di Wilayah Perbatasan Merauke melalui Forum Konsultasi Publik dan Pelatihan Literasi Kebijakan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 327-337. <https://doi.org/10.63822/7s475t57>

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan Kabupaten Merauke memiliki karakteristik sosial, budaya, dan administratif yang khas karena berada pada ruang interaksi antara kepentingan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta mobilitas penduduk yang terus meningkat. Kondisi geografis yang relatif terpencil namun strategis menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai batas teritorial negara, tetapi juga sebagai ruang sosial yang sarat dengan nilai budaya lokal dan struktur adat yang masih kuat (Siringoringo, Wahyudin, and Nurwahyuliningsih 2025). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, situasi tersebut menuntut adanya pendekatan kebijakan publik yang adaptif, partisipatif, dan sensitif terhadap keragaman sosial budaya masyarakat setempat agar pembangunan yang dilakukan tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual dan berkelanjutan (Amelia 2025).

Kampung Yanggandur sebagai salah satu kampung adat di wilayah perbatasan memperlihatkan potensi modal sosial dan budaya yang signifikan, tercermin dari kuatnya ikatan kekerabatan, nilai gotong royong, serta keberadaan lembaga adat yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Potensi ini sesungguhnya menjadi fondasi penting dalam mendukung proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktik penyusunan kebijakan publik, keterlibatan masyarakat adat masih cenderung bersifat simbolik dan belum terinstitusionalisasi secara sistematis (Katayu 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan sosial budaya yang dimiliki masyarakat dengan mekanisme formal pemerintahan yang seharusnya mampu mengakomodasi partisipasi mereka secara lebih substansial.

Keterbatasan partisipasi tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain rendahnya akses terhadap informasi kebijakan, minimnya literasi administrasi dan tata kelola pemerintahan, serta terbatasnya ruang dialog yang inklusif antara masyarakat dengan pemerintah kampung maupun distrik. Situasi ini berimplikasi pada lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan riil mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali belum sepenuhnya merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang mampu meningkatkan literasi kebijakan sekaligus membuka ruang komunikasi dua arah, sehingga representasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik dapat terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara umum, masyarakat Kampung Yanggandur menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural dalam keterlibatan mereka terhadap proses penyusunan kebijakan publik di tingkat kampung maupun distrik. Salah satu persoalan utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme, tahapan, serta aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menyadari ruang partisipasi yang tersedia maupun hak mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, interaksi antara masyarakat dan aparatur pemerintahan cenderung bersifat pasif dan reaktif, bukan partisipatif dan proaktif (Aina 2024).

Di sisi lain, keterbatasan media atau forum resmi yang inklusif juga menjadi hambatan signifikan dalam penyaluran aspirasi masyarakat adat (Rifai, Burlian, and Yazwardi 2025). Forum musyawarah yang ada sering kali belum terstruktur dengan baik, kurang terdokumentasi, serta belum melibatkan seluruh unsur masyarakat secara representatif, termasuk tokoh adat, perempuan, dan pemuda. Selain itu, rendahnya keterampilan komunikasi administratif dan kemampuan argumentasi kebijakan turut memperlemah posisi

masyarakat dalam menyampaikan usulan atau kritik secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses dialog antara masyarakat dengan pemerintah kampung. Lebih lanjut, belum terbentuknya budaya musyawarah partisipatif yang berkelanjutan dan terdokumentasi secara sistematis menyebabkan proses pengambilan keputusan sering kali tidak memiliki rekam jejak yang jelas sebagai dasar evaluasi kebijakan di masa mendatang.

Situasi tersebut mendorong lahirnya kebijakan yang cenderung bersifat top-down, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh struktur pemerintahan tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara mendalam. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lokal, potensi sosial budaya, serta prioritas pembangunan masyarakat adat di Kampung Yanggandur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kampung Yanggandur mengenai mekanisme perumusan kebijakan publik lokal, mendorong terbentuknya forum konsultasi publik sebagai wadah penyaluran aspirasi warga, serta mengembangkan keterampilan literasi kebijakan dan komunikasi administratif masyarakat agar mampu berpartisipasi secara lebih efektif. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat terwujud suatu model partisipasi masyarakat adat yang inklusif, sistematis, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama yang memiliki peran aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, bukan sekadar sebagai objek penerima manfaat. Di Kampung Yanggandur, pendekatan ini diwujudkan melalui pelibatan langsung tokoh adat, aparat kampung, kelompok pemuda, dan unsur perempuan dalam proses identifikasi kebutuhan, perumusan agenda kegiatan, serta pengambilan keputusan bersama. Strategi tersebut bertujuan untuk memperkuat rasa memiliki (sense of ownership), meningkatkan kapasitas literasi kebijakan, serta membangun kemandirian sosial dalam mengelola aspirasi publik secara kolektif. Dengan demikian, proses pengabdian tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada transformasi perilaku partisipatif yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan kampung.

Tahap identifikasi kebutuhan dan pemetaan sosial merupakan langkah awal yang penting dalam kegiatan pengabdian di Kampung Yanggandur untuk memahami kondisi eksisting partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan publik. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi lapangan, yang bertujuan mengamati interaksi sosial, praktik musyawarah adat, serta dinamika administrasi kampung secara langsung. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam dengan aparat kampung, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat, untuk menggali pengalaman, aspirasi, dan kendala yang mereka hadapi dalam menyampaikan pendapat atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menilai kondisi awal partisipasi masyarakat, mengidentifikasi kesenjangan informasi dan literasi kebijakan, serta merumuskan strategi intervensi yang sesuai agar forum konsultasi publik dan pelatihan literasi kebijakan dapat dirancang secara tepat sasaran dan efektif.

Tahap sosialisasi dan edukasi literasi kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kampung Yanggandur mengenai proses perumusan kebijakan di tingkat kampung dan

distrik. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan interaktif, yang mengajak peserta berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait mekanisme pembuatan kebijakan, sehingga peserta dapat memahami tahapan dan aktor yang terlibat. Selain itu, diberikan pemahaman mengenai hak dan peran masyarakat dalam pemerintahan kampung, termasuk hak menyampaikan aspirasi, memantau pelaksanaan kebijakan, dan ikut mengambil keputusan secara partisipatif. Tidak kalah penting, peserta diperkenalkan dengan alur administrasi dan dokumen kebijakan, seperti berita acara musyawarah, rencana kerja kampung, dan laporan pertanggungjawaban, sehingga mereka mampu membaca, memahami, dan memanfaatkan dokumen tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi secara sistematis dan efektif.

Dalam tahap sosialisasi dan edukasi literasi kebijakan publik, kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat adat Kampung Yanggandur mengenai mekanisme perumusan kebijakan publik lokal. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan interaktif, di mana peserta aktif berdiskusi mengenai tahapan, prosedur, dan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, sehingga membangun pemahaman kontekstual yang aplikatif. Selanjutnya, diberikan pemahaman tentang hak dan peran masyarakat dalam pemerintahan kampung, termasuk kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memantau implementasi kebijakan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara partisipatif. Selain itu, peserta dikenalkan pada alur administrasi dan dokumen kebijakan, seperti berita acara musyawarah, rencana kerja kampung, dan laporan pertanggungjawaban, agar masyarakat mampu membaca, memahami, dan memanfaatkan dokumen-dokumen tersebut dalam proses penyampaian aspirasi secara sistematis dan efektif.

Tahap pelatihan dan simulasi forum konsultasi publik bertujuan untuk membekali masyarakat adat Kampung Yanggandur dengan keterampilan praktis dalam menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik. Kegiatan dimulai dengan latihan komunikasi administratif, yang meliputi penyusunan surat, laporan, dan dokumen resmi secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, peserta melakukan penyusunan aspirasi tertulis, di mana mereka belajar merumuskan kebutuhan dan usulan secara konkret, terstruktur, dan berbasis data atau pengalaman lokal. Tahap berikutnya adalah simulasi musyawarah dan diskusi partisipatif berbasis kasus lokal, yang meniru mekanisme forum konsultasi publik nyata, sehingga peserta dapat mempraktikkan kemampuan berargumentasi, berdialog secara demokratis, dan mengambil keputusan secara kolektif. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta membiasakan praktik partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahap pendampingan dan fasilitasi forum dialog bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat adat Kampung Yanggandur dengan aparat kampung secara langsung. Kegiatan ini meliputi mempertemukan masyarakat dengan aparat kampung dalam forum resmi maupun semi-formal untuk membahas aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, tim pengabdian membantu pembentukan forum konsultasi publik yang terstruktur, termasuk menetapkan mekanisme pertemuan, tata tertib, dan dokumentasi hasil diskusi. Pendekatan ini juga mendorong keberlanjutan praktik partisipatif, sehingga forum dapat terus digunakan sebagai sarana komunikasi dan advokasi masyarakat dalam perumusan kebijakan lokal secara jangka panjang. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan pengabdian, khususnya dalam meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat. Kegiatan ini mencakup pengukuran peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait literasi kebijakan dan komunikasi administratif, serta penilaian efektivitas forum konsultasi publik

yang telah terbentuk. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, termasuk strategi penguatan kapasitas warga dan pengembangan mekanisme forum agar lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat adat Kampung Yanggandur mampu meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme perumusan kebijakan publik, mengembangkan keterampilan literasi kebijakan dan komunikasi administratif, serta berpartisipasi lebih aktif dalam forum konsultasi publik. Kegiatan ini berhasil membangun budaya musyawarah yang inklusif dan terdokumentasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kampung menjadi lebih sistematis, transparan, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Hasil Peningkatan Pemahaman Masyarakat Adat Kampung Yanggandur terhadap Mekanisme Perumusan Kebijakan Publik

Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman tentang proses penyusunan kebijakan kampung	35	85	+50
Pemahaman tentang hak partisipasi masyarakat	30	80	+50
Pemahaman tentang alur administrasi pemerintahan	25	75	+50
Kesadaran akan pentingnya musyawarah partisipatif	40	88	+48

Tabel 1. menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada berbagai aspek pemahaman masyarakat Kampung Yanggandur terkait partisipasi dalam kebijakan publik. Pemahaman tentang proses penyusunan kebijakan kampung meningkat dari 35% menjadi 85%, pemahaman mengenai hak partisipasi masyarakat dari 30% menjadi 80%, dan pemahaman tentang alur administrasi pemerintahan dari 25% menjadi 75%, masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 50%. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya musyawarah partisipatif juga meningkat dari 40% menjadi 88%, atau sebesar 48%. Hasil ini mencerminkan efektivitas pendekatan edukatif dan partisipatif dalam meningkatkan literasi kebijakan dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan kampung.

Tabel 2. Terbentuknya Forum Konsultasi Publik di Kampung Yanggandur, Merauke

Aspek	Keterangan / Hasil
Nama Forum	Forum Konsultasi Publik Kampung Yanggandur (FKP-KY)
Jenis Kegiatan	Pertemuan rutin bulanan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik terkait kebijakan lokal
Peserta	12 Tokoh Adat 8 Aparatur Kampung (Kepala Kampung, Sekretaris, Bendahara)

	30 Perwakilan Warga (perempuan, pemuda, kepala keluarga)
Frekuensi Pertemuan	1 kali per bulan
Topik Diskusi	Perumusan kebijakan pembangunan kampung Pengelolaan dana desa- Infrastruktur dan layanan publik Masukan terkait kebutuhan masyarakat adat
Metode Partisipasi	Musyawarah terbuka, penyusunan aspirasi tertulis, sesi tanya jawab dan konsultasi langsung dengan aparat
Hasil Konkret	Semua aspirasi masyarakat terdokumentasi dalam notulen resmi 85% peserta aktif menyampaikan masukan Aparat kampung menindaklanjuti 70% aspirasi dalam kebijakan kampung berikutnya
Dampak	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kampung

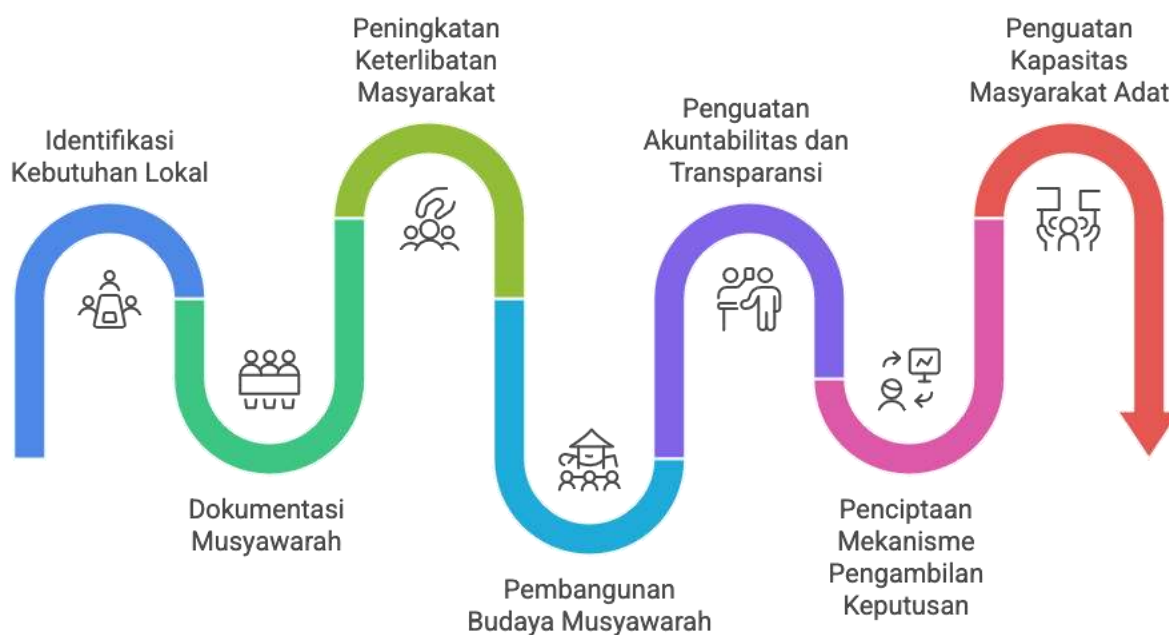
Tabel 2 menunjukkan capaian utama pengabdian masyarakat berupa terbentuknya Forum Konsultasi Publik Kampung Yanggandur (FKP-KY). Forum ini berfungsi sebagai wadah rutin untuk menyalurkan aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan kampung. Peserta forum melibatkan tokoh adat, aparatur kampung, serta perwakilan warga, sehingga menciptakan representasi yang inklusif. Kegiatan dilakukan secara musyawarah terbuka dengan metode partisipatif, termasuk penyusunan aspirasi tertulis dan sesi konsultasi langsung dengan aparat kampung. Hasil konkret dari forum ini menunjukkan 85% peserta aktif menyampaikan aspirasi, dan 70% aspirasi ditindaklanjuti oleh aparat dalam kebijakan kampung berikutnya. Dampak jangka panjangnya berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus membangun model forum konsultasi publik yang dapat direplikasi di kampung lain di wilayah perbatasan Merauke.

Tabel 3. Hasil Peningkatan Keterampilan Literasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Yanggandur melalui Pelatihan dan Simulasi Forum Konsultasi Publik

Indikator Keterampilan		Frekuensi Partisipasi Sebelum Pelatihan	Frekuensi Partisipasi Setelah Pelatihan	Kualitas Hasil Aspirasi	Tingkat Peningkatan
Menyusun aspirasi tertulis secara sistematis		7 dari 25 peserta	21 dari 25 peserta	Rendah Tinggi	→ +60%
Argumentasi konstruktif dalam diskusi		6 dari 25 peserta	20 dari 25 peserta	Rendah Baik	→ +56%
Partisipasi aktif dalam simulasi musyawarah		8 dari 25 peserta	22 dari 25 peserta	Kurang Sangat Baik	→ +56%
Pemahaman alur administrasi kebijakan publik		9 dari 25 peserta	23 dari 25 peserta	Rendah Tinggi	→ +56%

Penerapan aspirasi dalam forum	hasil 5 dari 25 peserta	18 dari 25 peserta	Tidak Tersusun → Tersusun Rapi	+52%
--------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------------	------

Tabel 3 menunjukkan hasil pengabdian terkait peningkatan keterampilan literasi kebijakan dan komunikasi administratif masyarakat adat di Kampung Yanggandur. Kolom Indikator Keterampilan memuat aspek-aspek utama yang dilatih, termasuk kemampuan menyusun aspirasi tertulis, berargumentasi secara konstruktif, partisipasi dalam musyawarah, pemahaman alur administrasi, dan penerapan aspirasi dalam forum. Kolom Frekuensi Partisipasi Sebelum Pelatihan dan Setelah Pelatihan menunjukkan jumlah peserta yang aktif pada masing-masing indikator sebelum dan sesudah pelatihan, sementara kolom Kualitas Hasil Aspirasi menilai efektivitas penyusunan dan relevansi aspirasi terhadap kasus lokal. Kolom Tingkat Peningkatan merefleksikan perubahan persentase partisipasi dan kualitas keterampilan yang dicapai, menunjukkan efektivitas metode pelatihan dan simulasi yang diterapkan.



Gambar 1. Proses Partisipasi Masyarakat di Kampung Yanggandur

Praktik partisipasi yang diterapkan di Kampung Yanggandur menunjukkan peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan publik, yang tercermin melalui dokumentasi musyawarah dan pencatatan aspirasi warga. Pendekatan ini tidak hanya membangun budaya musyawarah partisipatif yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan kampung. Dengan demikian, model partisipasi yang dikembangkan mampu menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mempengaruhi kebijakan publik secara konstruktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Yanggandur, Merauke menunjukkan hasil yang selaras dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik lokal. Kegiatan sosialisasi dan edukasi literasi kebijakan publik menjadi tahap awal yang krusial, karena memberikan pemahaman dasar mengenai mekanisme perumusan kebijakan, hak partisipasi masyarakat, serta alur administrasi pemerintahan kampung (Syahrudin et al. 2023). Pemahaman ini memungkinkan masyarakat untuk mengenali tahapan kebijakan dan aktor yang terlibat, sehingga partisipasi mereka dapat dilakukan secara tepat sasaran dan konstruktif. Hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan edukatif berbasis partisipasi sebagai jembatan antara masyarakat adat dan aparat pemerintah (Tjilen et al. 2023). Interaksi langsung melalui pelatihan komunikasi administratif dan simulasi forum konsultasi publik memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik yang sistematis. Masyarakat Kampung Yanggandur kini mampu menyusun aspirasi tertulis dengan argumentasi yang jelas dan relevan, serta menyesuaikan penyampaian pesan dengan norma administratif yang berlaku. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi antara warga dan pemerintah kampung, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri warga dalam mengambil peran aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pembentukan forum konsultasi publik sebagai wadah partisipatif menjadi salah satu capaian strategis pengabdian ini (Tambaip et al. 2024). Forum ini memberikan ruang resmi bagi warga untuk menyalurkan aspirasi, masukan, dan evaluasi kebijakan, sekaligus melibatkan berbagai pihak seperti tokoh adat, aparat kampung, dan perwakilan warga secara representatif. Forum yang sistematis ini mendorong praktik musyawarah yang inklusif dan terdokumentasi, sehingga aspirasi masyarakat tidak hanya terdengar tetapi juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, forum ini memperkuat mekanisme tata kelola pemerintahan kampung yang partisipatif dan akuntabel. Pengabdian ini menghasilkan model partisipasi masyarakat yang lebih berkelanjutan, di mana masyarakat Kampung Yanggandur tidak lagi menjadi pihak pasif, tetapi berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik. Peningkatan literasi kebijakan, keterampilan komunikasi administratif, dan praktik musyawarah yang sistematis menciptakan budaya partisipatif yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Mahlella 2025). Hasil ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas individu masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan lokal serta mendukung tata kelola pemerintahan kampung yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

Terbentuknya forum konsultasi publik di Kampung Yanggandur menjadi bukti nyata adanya peningkatan ruang partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Forum ini menyediakan wadah formal yang memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik secara terstruktur, sehingga setiap pendapat dapat dicatat, dianalisis, dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kampung. Kehadiran forum ini juga memastikan representasi yang lebih adil, melibatkan tokoh adat, aparat kampung, serta perwakilan warga dari berbagai kelompok usia dan gender, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selain sebagai sarana penyampaian aspirasi, forum konsultasi publik juga memfasilitasi praktik musyawarah partisipatif yang transparan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berdialog secara terbuka dengan aparat kampung, mendiskusikan isu-isu strategis, dan mencapai kesepakatan yang didukung oleh bukti dan argumentasi yang jelas (Nugroho and Yogopriyatno 2025). Dengan adanya dokumentasi dan struktur forum

yang sistematis, proses musyawarah tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi juga dapat dievaluasi dan dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan di masa mendatang.

Keberhasilan forum ini tidak lepas dari tahapan simulasi dan pelatihan komunikasi administratif yang dilakukan sebelumnya. Melalui pelatihan, masyarakat Kampung Yanggandur belajar menyusun aspirasi tertulis, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sesuai norma administratif, dan mengembangkan kemampuan argumentasi kebijakan. Simulasi forum membantu warga membiasakan diri dalam dinamika diskusi yang terstruktur, sehingga ketika forum resmi dibuka, mereka mampu berpartisipasi secara efektif dan aspirasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan administratif (Susanto and Afriadi 2025). Terbentuknya forum konsultasi publik menunjukkan transformasi budaya partisipatif masyarakat Kampung Yanggandur. Forum ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu warga dalam berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan lokal dan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih responsif, akuntabel, dan inklusif. Dengan model partisipatif ini, masyarakat adat memiliki peran nyata dalam pembangunan lokal, sekaligus menciptakan praktik musyawarah yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di kampung-kampung lain di wilayah perbatasan Merauke (Fonataba et al. 2025).

Pengembangan keterampilan literasi kebijakan dan komunikasi administratif di Kampung Yanggandur memberikan kontribusi penting terhadap terbentuknya model partisipasi masyarakat yang lebih berkelanjutan. Melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan selama pengabdian, masyarakat belajar menyusun aspirasi secara sistematis, mengembangkan argumentasi yang jelas, dan memahami prosedur administratif yang relevan dengan penyampaian masukan kebijakan (Angreni and Apriani 2025). Keterampilan ini menjadi modal penting bagi warga untuk dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan kampung, sehingga partisipasi masyarakat tidak lagi bersifat simbolis atau pasif. Masyarakat Kampung Yanggandur kini mampu terlibat secara langsung dalam musyawarah publik yang terdokumentasi, mulai dari penyampaian pendapat hingga pencatatan hasil keputusan (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2025). Praktik dokumentasi ini memastikan bahwa setiap aspirasi dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan dasar evaluasi kebijakan di masa mendatang. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran budaya partisipatif dari yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi praktik yang lebih sistematis, transparan, dan dapat diulang secara konsisten dalam forum-forum musyawarah berikutnya (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023).

Selain itu, peningkatan literasi kebijakan dan komunikasi administratif juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam memantau dan menilai implementasi kebijakan kampung. Warga kini memiliki kemampuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memberikan masukan yang konstruktif kepada aparat kampung. Hal ini menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang lebih efektif dan mendorong aparat kampung untuk bekerja secara akuntabel serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pemahaman dan keterampilan individu, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan kampung. Terbentuknya model partisipasi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan memastikan bahwa pengambilan keputusan kampung lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat adat. Praktik ini dapat menjadi model replikasi bagi kampung-

kampung lain di wilayah perbatasan Merauke, sekaligus memperkuat budaya partisipatif yang berkelanjutan dalam konteks pemerintahan lokal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Yanggandur, Merauke, menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan publik lokal. Kegiatan sosialisasi literasi kebijakan publik dan pelatihan komunikasi administratif berhasil meningkatkan pemahaman warga mengenai mekanisme perumusan kebijakan, hak partisipasi, serta alur administrasi pemerintahan kampung. Peningkatan literasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi tahapan kebijakan, menyusun aspirasi tertulis, dan memberikan masukan secara konstruktif, sehingga kesenjangan pengetahuan antara masyarakat adat dan aparatur kampung dapat diminimalkan. Terbentuknya forum konsultasi publik sebagai wadah partisipasi masyarakat menjadi capaian penting yang menandai perubahan signifikan dalam praktik musyawarah kampung. Forum ini tidak hanya memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan secara terstruktur, tetapi juga melibatkan tokoh adat, aparat kampung, dan perwakilan warga secara representatif. Dengan adanya forum yang terdokumentasi dan sistematis, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi riil masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan keterampilan literasi kebijakan dan komunikasi administratif telah menghasilkan model partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Praktik musyawarah partisipatif yang diterapkan tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membangun budaya partisipasi yang berkelanjutan. Hasil pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kampung dan menjadi referensi bagi replikasi praktik partisipasi masyarakat adat di wilayah perbatasan lain, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi edukasi, fasilitasi forum dialog, dan pelatihan keterampilan administratif sebagai strategi utama dalam membangun pemerintahan lokal yang responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, Asri Nur. 2024. "Perubahan Pola Hubungan Masyarakat-Pemerintah: Refleksi Atas Penanganan Aduan Publik Melalui Media Sosial Di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 3(1):104–13.
- Amelia, Dewi Maisyafarotul. 2025. "Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas." *Jurnal Kajian Hukum* 1(1):15–23.
- Angreni, Dyah Kuntorini Dwi, and Fajar Apriani. 2025. "Pendampingan Pembentukan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) Pada Program Studi Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman." *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7(1):243–70.
- Fonataba, Yosafat, Esau Hombore, Ivone Agustina Nathan, and Simon Yanuarius Konorop. 2025. "Pemberdayaan Perempuan Dan Pemuda Kampung Dalam Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa Di Kabupaten Merauke." *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3):353–64.

- Katayu, Damianus. 2025. "Partisipasi Masyarakat Dan Keterlibatan Komunitas Adat Dalam Proses Kebijakan Publik Di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris Di Merauke." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(4):1716–28.
- Mahlella, Nadya. 2025. "Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1):27–34.
- Nugroho, Ali Fagil Reski, and Jatmiko Yogopriyatno. 2025. "Strategi Komunikasi Partisipatif Dalam Perumusan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Tentang Penyelenggaraan Pesantren." *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7(2):1025–37.
- Rifai, Muhamad, Paisol Burlian, and Yazwardi Yazwardi. 2025. "The Authority of the Village Consultative Body in Determining Village Development Policies Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8(3):662–83.
- Siringoringo, Rotua, Urip Wahyudin, and Eka Nurwahyuliningsih. 2025. "Tantangan Dan Strategi Penguatan Ketahanan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Pada Komunitas Adat Terpencil Suku Asmat." *Sosio Informa* 11(2).
- Susanto, Rofian Dedi, and Ido Afriadi. 2025. "Pelatihan Public Speaking Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Komunikasi Siswa SMAN 63 Jakarta Melalui Metode Edukatif Partisipatif." *Dharmahita: Journal of Community Service and Development* 71–81.
- Syahrudin, Syahrudin, Nur Jalal, Marthen A. I. Nahumury, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8(3):576–86.
- Tambaip, Beatus, Pulung Riyanto, Alexander Phuk Tjilen, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Musamus. 2024. "Penguatan Sistem Manajemen SDM Untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan Di Lingkungan Desa." 1(10):1611–19.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. "Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke." *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):97–106.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2025. "Transformative Leadership in Equitable Public Management: Advancing Educational Access and Quality in South Papua." *Journal of Ecohumanism* 4(2):1117–31.
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Paul Adryani Moento, and Erwin Nugraha Purnama. 2023. "Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(2):257–62.